



Polres Ketapang Ekpos Kasus Drainase ke BPK

KETAPANG, SP - Kasus dugaan korupsi pembangunan drainase di Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Delta Pawan dengan pagu anggaran sekitar Rp3,3 miliar yang dilaksanakan pada tahun 2015 lalu terus berlanjut.

Setelah sebelumnya mengirim sampel fisik pekerjaan drainase ke ahli, kali ini Polres Ketapang melakukan ekpos kasus tersebut ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait indikasi penyimpangan dalam pembangunan yang dikerjakan oleh PT Graha Raya Perkasa (GRP).

Saat dikonfirmasi, Kapolres Ketapang, AKBP Sunario melalui Kanit Tipikor Reskrim Polres Ketapang, IPTU Rudianto mengatakan, saat ini kepolisian telah melakukan ekpos ke BPK terkait kasus drainase.

"Beberapa pekan lalu kita sudah ekpos kasusnya ke BPK," ujarnya belum lama ini.

BPK sendiri, diakuinya sudah mengetahui adanya kasus ini, pasalnya telah melakukan peneguran terhadap para pelaksana. Iapun menegaskan, dalam pembangunan drainase tersebut, salah satu dugaan penyimpangan, yakni, terletak pada tidak sesuai spesifikasi pembangunan, bahkan beberapa waktu lalu sudah dilakukan pengiriman sampel bukti pembanguiran drainase untuk diteliti.

"Kita saat ini tinggal menunggu hasil dari ekpos tersebut," tuturnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak LPSE

Ketapang, terkait proses lelang dan proyek tersebut oleh pelaksana pekerjaan.

"Untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK-red) Pak Aminollah, dan pelaksanaanya kalau tidak salah Sulian," katanya.

Sementara itu, saat hendak dikonfirmasi, Sulian tidak memberikan jawaban bahkan beberapa kali telepon oleh awak media, yang bersangkutan tidak merespon konfirmasi dari para wartawan.

Untuk diketahui, sebelumnya Kapolres Ketapang, AKBP Sunario melalui Kasat Reskrim Polres Ketapang, AKP Rully Robinson Polii mengatakan, pembangunan drainase disinyalir adanya dugaan korupsi, lantaran diketahui ada pekerjaan yang telah selesai, tapi tidak sesuai dengan apa yang dipersyaratkan di dalam dokumen kontrak pekerjaan, seperti kualitas beton yang dipakai.

Bahkan, pihaknya sudah mengambil sampel 26 titik sepanjang kerjaan drainase itu, kemudian dari saksi ahli memberikan keterangan adanya dugaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak.

Pada tahun 2016 lalu, tepatnya Minggu 1 Mei 2016 saat Polres Ketapang masih dipimpin AKBP Hady Poerwanto melalui Mantan Kasat Reskrim Polres Ketapang tahun 2016, AKP Belen Pratama kepada awak media mengatakan, selain pembangunan tidak sesuai spesifikasi, proyek ini juga terjadi tiga kali addendum pekerjaan, di antaranya pada tahap perencanaan dan pelaksanaannya. **(teo/bob)**